

**KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**DARUSMAN
011500031.P**

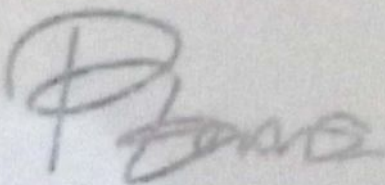
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DARUSMAN
NIM : 011800031P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG DI KOTA PALEMBANG

Palembang, 20 Maret 2019

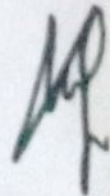
DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. RIANDA RIVİYUSNITA, SH, M.Kn

Pembimbing Kedua,



WINDI ARISTA, SH, MH

KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG DI KOTA PALEMBANG

Penulis Skripsi,
DARUSMAN
011800031.P

Pembimbing Pertama,
DR. HJ. RIANDA RIVYUSNITA, SH., M.Kn.
Pembimbing Kedua,
WINDI ARISTA, SH., MH.

ABSTRAK

Sektor transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi penumpang dan barang yang berkembang dengan baik serta mempunyai peran didalam menunjang pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kebijakan dinas perhubungan dalam melakukan pengawasan angkutan barang di Kota Palembang dan bagaimanakah efektifitas fungsi pengawasan angkutan barang yang dilakukan Dinas Perhubungan di Kota Palembang.

Jenis penelitian tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat eksploratoris, karenanya tidak bermaksud menguji hipotesa.

Hasil penelitian didapat bahwa kebijakan Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan angkutan barang di Kota Palembang yaitu adanya Kebijakan Internal dan Kebijakan Eksternal. Efektifitas fungsi pengawasan angkutan barang yang dilakukan Dinas Perhubungan di Kota Palembang bahwa fungsi pengawasan angkutan barang oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang melalui pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung masih kurang efektif karena pada pelaksanaannya masih ada praktik pungutan liar, baik secara langsung maupun dengan menggunakan koin terhadap pengemudi angkutan barang yang mengalami kelebihan muatan.

Rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Palembang untuk memberlakukan suatu regulasi yang integral dan komprehensif. Hal ini dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan perhubungan yang nyaman sekaligus aman, sehingga dapat lebih mendorong peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci : Kebijakan, Pengawasan, Pengangkutan Barang

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Ruang Lingkup.....	10
D. Metodologi.....	11
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palembang	13
B. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang	14
C. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Palembang	15
D. Pengertian Pengawasan dan Efektifitas Pengawasan	16
E. Tujuan Pengawasan.....	23
F. Prinsip-prinsip Pengawasan	24
G. Jenis-jenis Pengawasan	25
BAB III	KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG DI KOTA PALEMBANG
A. Kebijakan Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Pengawasan Angkutan Barang di Kota Palembang.....	30
B. Efektifitas Fungsi Pengawasan Angkutan Barang Yang Dilakukan Dinas Perhubungan di Kota Palembang	35
BAB IV	PENUTUP
A. Kesimpulan	41
B. Saran-saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan angkutan barang di Kota Palembang yaitu adanya Kebijakan Internal dan Kebijakan Eksternal. Kebijakan Internal pada Dinas Perhubungan perlu ditunjang dengan manajemen administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan, kinerja, dan perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Palembang, peningkatan kondisi prasarana jalan, perlu di bangun prasarana terminal yang representatif, dengan diadakannya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan parkir tersebut dapat mendukung kelancaran dan ketetapan pelayanan angkutan, dan perlu didukung dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan angkutan dalam membantu pengendalian guna menunjang kelancaran dan ketertiban berlalu lintas serta meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas yang dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Kebijakan Eksternal yaitu peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya transportasi, pembinaan terhadap pemilik/ pengusaha angkutan yang berdomisili

didalam Kota Palembang, peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa transportasi dan pembangunan lanjutan terminal type A.

2. Efektifitas fungsi pengawasan angkutan barang yang dilakukan Dinas Perhubungan di Kota Palembang bahwa fungsi pengawasan angkutan barang oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang melalui pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung masih kurang efektif karena pada pelaksanaannya masih ada praktik pungutan liar, baik secara langsung maupun dengan menggunakan koin terhadap pengemudi angkutan barang yang mengalami kelebihan muatan. Pengawasan secara langsung dilakukan dengan mengoperasionalkan jembatan timbang dan melaksanakan pemeriksaan kendaraan angkutan barang berupa pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan dan pemeriksaan tanda bukti lulus uji, surat tanda bukti pendaftaran/surat tanda coba kendaraan bermotor dan surat ijin mengemudi. Pengawasan secara tidak langsung dilaksanakan dengan memberlakukan tertib operasional angkutan barang, yaitu pengoperasian mobil barang di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas layak jalan, pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus sesuai peruntukannya dan pengoperasian mobil barang di jalan wajib sesuai dengan kelas jalan dan jaringan lintas yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Handayani, Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Haji Masagung, Jakarta, 2002
- Hasibuan, Malayu S.P., *Organisasi dan Manajemen*, Rajawali Press, Jakarta, 2002
- Irfan Saputra, *Efektivitas Pengawasan Angkutan Barang (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)*, Unila, Lampung, 2017.
- Kusnadi, *Masalah, Kerjasama, Konflik dan Kinerja*, Taroda, Malang, 2002
- Lubis, Ibrahim, *Pengawasan dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Salusu, J., *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2001
- Siagian, Sondang., *Fungsi-Fungsi Manajerial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005
- Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2005
- Steers, Richard M., *Efektivitas Organisasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2010

Peraturan :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Internet :

<http://jdih.sumselprov.go.id/userfiles/PERGUB%20NO.62%20THN%202008.pdf>, diakses tanggal 10 Januari 2019

Sumber lainnya :

Data dari Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2018

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1996